



LURAH NGORO-ORO  
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGORO-ORO  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH NGORO-ORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Patuk tanggal 28 Desember 2021, Nomor 36/KPTS/2021 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Ngoro-oro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Gunungkdiul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
16. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Kalurahan Ngoro-oro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Ngoro-oro Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO  
Dan  
LURAH NGORO-ORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGORO-ORO  
TAHUN ANGGARAN 2022

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngoro-oro Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.724.623.600,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	1.967.790.186,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(243.166.586,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	243.166.586,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	243.166.586,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngoro-oro.

Ditetapkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 31 Desember 2021  
LURAH,

ttd

SUKASTO

Diundangkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 31 Desember 2021  
CARIK

ttd

DALYUNI

LEMBARAN KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2021 NOMOR ..6..

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO  
 NOMOR 6 TAHUN  
 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGORO-ORO  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6,600,000.00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1,679,223,600.00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	38,800,000.00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,724,623,600.00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	689,983,832.00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	711,324,860.00	
5.3.	Belanja Modal	169,580,498.00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	396,900,996.00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,967,790,186.00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(243,166,586.00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>243,166,586.00</b>	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	243,166,586.00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>243,166,586.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0.00</b>	

Ngoro-oro, 31 Desember 2021

Lurah

ttd

SUKASTO

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO  
 NOMOR 6 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGORO-ORO  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	41	Pendapatan Asli Desa	6,600,000.00	
	42	Pendapatan Transfer	1,679,223,600.00	
	43	Pendapatan Lain-lain	38,800,000.00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,724,623,600.00</b>	
	<b>2</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>0,931,807,937.00</u></b>	
<b>11</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>777,288,217.00</b>	
1101		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40,950,000.00	ADD, DLL
1101	51	Belanja Pegawai	40,950,000.00	
1102		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	557,252,800.00	ADD, DLL
1102	51	Belanja Pegawai	557,252,800.00	
1103		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38,281,032.00	ADD
1103	51	Belanja Pegawai	38,281,032.00	
1104		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	61,344,385.00	ADD
1104	52	Belanja Barang dan Jasa	61,344,385.00	
1105		Penyediaan Tunjangan BPD	53,500,000.00	ADD
1105	51	Belanja Pegawai	53,500,000.00	
1106		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7,450,000.00	ADD
1106	52	Belanja Barang dan Jasa	7,450,000.00	
1107		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18,510,000.00	PBH
1107	52	Belanja Barang dan Jasa	18,510,000.00	
<b>12</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>82,661,000.00</b>	
1201		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1,100,000.00	PBH
1201	53	Belanja Modal	1,100,000.00	
1202		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4,261,000.00	DLL
1202	52	Belanja Barang dan Jasa	4,261,000.00	
1203		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	63,000,000.00	PBP
1203	53	Belanja Modal	63,000,000.00	
1290		Pengadaan peralatan kerja	3,000,000.00	PBH
1290	53	Belanja Modal	3,000,000.00	
1291		Pengadaan mebeleur	4,800,000.00	DLL
1291	53	Belanja Modal	4,800,000.00	
1294		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2,500,000.00	DLL
1294	52	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	
1295		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	4,000,000.00	PAD
1295	52	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	
<b>13</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>10,100,197.00</b>	

1302		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4,322,000.00	PBH
1302	52	Belanja Barang dan Jasa	4,322,000.00	
1303		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2,328,197.00	PBH
1303	52	Belanja Barang dan Jasa	2,328,197.00	
1390		Penyusunan monografi desa	1,000,000.00	DLL
1390	52	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	
1391		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2,450,000.00	PAD
1391	52	Belanja Barang dan Jasa	2,450,000.00	
<b>14</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>57,290,025.00</b>	
1401		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7,994,200.00	PBH
1401	52	Belanja Barang dan Jasa	7,994,200.00	
1402		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5,950,000.00	PBH
1402	52	Belanja Barang dan Jasa	5,950,000.00	
1403		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3,350,000.00	ADD
1403	52	Belanja Barang dan Jasa	3,350,000.00	
1404		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7,400,000.00	DLL
1404	52	Belanja Barang dan Jasa	7,400,000.00	
1405		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3,600,000.00	PBH
1405	52	Belanja Barang dan Jasa	3,600,000.00	
1406		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2,400,000.00	PAD
1406	52	Belanja Barang dan Jasa	2,400,000.00	
1407		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1,747,400.00	DLL
1407	52	Belanja Barang dan Jasa	1,747,400.00	
1408		Pengembangan Sistem Informasi Desa	20,040,000.00	DDS
1408	52	Belanja Barang dan Jasa	20,040,000.00	
1490		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	2,654,000.00	DLL
1490	52	Belanja Barang dan Jasa	2,654,000.00	
1496		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	2,154,425.00	DLL
1496	52	Belanja Barang dan Jasa	2,154,425.00	
<b>15</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>4,468,498.00</b>	
1590		Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	4,468,498.00	DLL
1590	53	Belanja Modal	4,468,498.00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>315,202,500.00</u></b>	
<b>21</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>30,090,000.00</b>	
2101		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24,300,000.00	DDS
2101	52	Belanja Barang dan Jasa	24,300,000.00	
2102		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2,100,000.00	DDS
2102	52	Belanja Barang dan Jasa	2,100,000.00	
2108		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3,690,000.00	DDS
2108	52	Belanja Barang dan Jasa	3,690,000.00	
<b>22</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>166,000,000.00</b>	
2202		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	82,170,000.00	DDS
2202	52	Belanja Barang dan Jasa	82,170,000.00	
2203		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3,875,000.00	DDS
2203	52	Belanja Barang dan Jasa	3,875,000.00	
2204		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9,130,000.00	DDS
2204	52	Belanja Barang dan Jasa	9,130,000.00	
2209		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9,925,000.00	DDS
2209	52	Belanja Barang dan Jasa	9,925,000.00	

2290		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	28,990,000.00	DDS
2290	52	Belanja Barang dan Jasa	28,990,000.00	
2291		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	10,775,000.00	DDS
2291	52	Belanja Barang dan Jasa	10,775,000.00	
2294		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	3,385,000.00	DDS
2294	52	Belanja Barang dan Jasa	3,385,000.00	
2298		Insentif kader kesehatan/KB	17,750,000.00	DDS
2298	52	Belanja Barang dan Jasa	17,750,000.00	
<b>23</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>48,450,000.00</b>	
2315		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	40,000,000.00	PBK
2315	52	Belanja Barang dan Jasa	40,000,000.00	
2317		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	3,950,000.00	DDS
2317	52	Belanja Barang dan Jasa	3,950,000.00	
2392		Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa	4,500,000.00	DDS
2392	52	Belanja Barang dan Jasa	4,500,000.00	
<b>24</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>56,176,000.00</b>	
2491		Pemberian stimulan jamban sehat	46,134,000.00	DDS
2491	52	Belanja Barang dan Jasa	46,134,000.00	
2492		Pengelolaan sampah desa/permukiman	10,042,000.00	DDS
2492	52	Belanja Barang dan Jasa	10,042,000.00	
<b>26</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>8,486,500.00</b>	
2602		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1,131,500.00	PBH
2602	52	Belanja Barang dan Jasa	1,131,500.00	
2603		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7,355,000.00	DDS
2603	52	Belanja Barang dan Jasa	125,000.00	
2603	53	Belanja Modal	7,230,000.00	
<b>28</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>6,000,000.00</b>	
2890		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	6,000,000.00	DDS
2890	52	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>54,476,703.00</u></b>	
<b>31</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>17,106,803.00</b>	
3102		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	6,450,000.00	DLL
3102	52	Belanja Barang dan Jasa	6,450,000.00	
3104		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3,200,000.00	PBH
3104	52	Belanja Barang dan Jasa	3,200,000.00	
3107		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. Di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	2,775,000.00	DLL
3107	52	Belanja Barang dan Jasa	2,775,000.00	
3190		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4,681,803.00	PBH
3190	52	Belanja Barang dan Jasa	4,681,803.00	
<b>32</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>14,230,000.00</b>	
3203		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6,380,000.00	DLL
3203	52	Belanja Barang dan Jasa	6,380,000.00	
3290		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7,850,000.00	PBH
3290	52	Belanja Barang dan Jasa	7,850,000.00	
<b>33</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>6,619,900.00</b>	
3304		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	1,625,000.00	DLL
3304	52	Belanja Barang dan Jasa	1,625,000.00	
3306		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2,990,000.00	PBH
3306	52	Belanja Barang dan Jasa	2,990,000.00	
3393		Operasional Karang Taruna	2,004,900.00	PBH
3393	52	Belanja Barang dan Jasa	2,004,900.00	
<b>34</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>16,520,000.00</b>	

3491		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3,800,000.00	DDS
3491	52	Belanja Barang dan Jasa	3,800,000.00	
3492		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	5,750,000.00	PBH
3492	52	Belanja Barang dan Jasa	5,750,000.00	
3495		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2,820,000.00	PBH
3495	52	Belanja Barang dan Jasa	2,820,000.00	
3496		Operasional PKK	4,150,000.00	PBH
3496	52	Belanja Barang dan Jasa	4,150,000.00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>269,402,050.00</u></b>	
<b>41</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>27,384,000.00</b>	
4105		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	27,384,000.00	DDS
4105	52	Belanja Barang dan Jasa	27,384,000.00	
<b>42</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>137,048,400.00</b>	
4203		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	123,928,400.00	DDS
4203	52	Belanja Barang dan Jasa	123,928,400.00	
4291		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	9,745,000.00	DDS
4291	52	Belanja Barang dan Jasa	9,745,000.00	
4292		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3,375,000.00	DDS
4292	52	Belanja Barang dan Jasa	3,375,000.00	
<b>44</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>7,200,000.00</b>	
4403		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	7,200,000.00	DDS
4403	52	Belanja Barang dan Jasa	7,200,000.00	
<b>46</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>4,000,000.00</b>	
4602		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4,000,000.00	DDS
4602	52	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	
<b>47</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>93,769,650.00</b>	
4702		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	86,889,650.00	PAD
4702	52	Belanja Barang dan Jasa	907,650.00	
4702	53	Belanja Modal	85,982,000.00	
4704		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4,880,000.00	DDS
4704	52	Belanja Barang dan Jasa	4,880,000.00	
4792		Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	2,000,000.00	DDS
4792	52	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>396,900,996.00</u></b>	
<b>51</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>65,700,996.00</b>	
5101		Kegiatan Penanggulangan Bencana	65,700,996.00	DDS
5101	54	Belanja Tidak Terduga	65,700,996.00	
<b>53</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>331,200,000.00</b>	
5301		Penanganan Keadaan Mendesak	331,200,000.00	DDS
5301	54	Belanja Tidak Terduga	331,200,000.00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,967,790,186.00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(243,166,586.00)</b>	
<b>3</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>61</b>		<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>243,166,586.00</b>	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>243,166,586.00</b>	
		<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0.00</b>	

Ngoro-oro, 31 Desember 2021

Lurah

ttd

SUKASTO

31/12/2021 2:42:52 PM